

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik adalah suatu keniscayaan bagi negara yang menganut asas demokrasi, dalam negara demokrasi masyarakat adalah penentu nasibnya sendiri dan masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih pemimpin sesuai kehendaknya, dalam lingkup terkecil contoh partisipasi politik yaitu pemilihan kepala desa, dimana masyarakat turut serta dalam aktivitas politik tersebut yaitu memilih kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa ada beberapa hal yang menarik untuk di teliti terutama desa yang berada di perkampungan, karena orang-orang di perkampungan dianggap kurang melek terhadap politik oleh karena itu banyak hal-hal yang melanggar asas-asas pancasila, misalnya politik uang (*money politic*), hal itu adalah cara yang sangat tidak pancasilais untuk menarik simpati masyarakat, bahkan masyarakat cenderung mengabaikan visi misi yang dibawa oleh calon kepala desa. Oleh karena itu, sepatutnya partisipasi politik masyarakat bisa diarahkan sebagai partisipasi politik yang sehat dan masyarakat bisa membedakan pemimpin yang layak dan tidak layak untuk dipilih, pentingnya

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan juga tercantum dalam Al-Qur'an misalnya dalam surat Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”¹

Seperti uraian penulis diatas, permasalahan yang di hadapi di lingkungan desa salah satunya politik uang (*money politic*), ini tidak hanya terjadi di Desa Sukarame tetapi hampir di seluruh desa di Indonesia terutama mereka yang kesadaran politiknya masih kurang, yang penting untuk mereka adalah uang kampanye dan pasti mereka akan memilih orang yang bersangkutan. Itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini dimana suara mereka bisa dibeli dengan uang yang jumlahnya tidak seberapa demi memuluskan niatnya menjadi penguasa. Orang yang mempunyai kesadaran akan politik dan bisa memahami asas demokrasi pasti akan merasa miris dengan hal tersebut, karena itu menunjukkan betapa rendahnya nilai

¹ Al-Qur'an Surat As Syura ayat 38.

kejujuran bagi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin sehingga hal itu jadi pekerjaan rumah bersama bagi masyarakat agar bisa lebih kritis dalam menentukan pilihan karena itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di desa tersebut. Seharusnya mereka yang akan maju menjadi calon kepala desa sudah melakukan beberapa kegiatan atau perbuatan yang bisa menimbulkan kepercayaan publik bukan dengan cara kotor seperti *money politic* itu adalah cara yang sangat tidak pancasilais.

Kepercayaan publik perlu terus dijaga agar aturan, regulasi dan prinsip-prinsip dalam interaksi dan transaksi politik, hukum dan ekonomi dalam masyarakat demokratik dapat berjalan dengan baik, karena itu dalam kontrak sosial negara memiliki kewajiban konstitusional untuk terus memelihara kepercayaan publik itu. Terjaganya kepercayaan publik adalah *raison d'être* dari suatu negara.² Jika sudah memiliki kepercayaan publik akan mudah bagi mereka dipilih oleh masyarakat dan masyarakat akan lebih simpatik. Itulah pentingnya kepercayaan publik karena masyarakat juga pasti akan melihat dan memilih orang yang memang berkompeten menjadi kepala desa ada banyak cara untuk mendapatkan kepercayaan publik

² Robby Arya Brata, *Good Governance dan Permasalahan Pemerintahan Strategis*. (Bogor: In Media, 2014), h. 17

diantaranya melakukan pembangunan yang berguna untuk masyarakat banyak atau melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu sangatlah penting guna memuluskan niatnya menjadi pemimpin dan cara tersebut lebih mulia dan elegan.

Menurut Susan Rose Ackerman, bila secara umum pejabat publik tidak dapat dipercaya, masyarakat awam dan pebisnis akan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan adalah melalui suap³ oleh karena itu membangun kepercayaan mutlak sangatlah di perlukan bagi mereka yang akan maju menjadi kepala desa. Jika mereka tida dipercayai oleh masyarakat pasti ujung-ujungnya suap. Itu adalah penyakit yang dimiliki oleh para pejabat di Indonesia yaitu suap. Oleh karena itu kejujuran sangat fungsional agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses demokrasi dapat terus terjaga. Legitimasi pemerintah akan meningkat bila pemerintah dapat diandalkan, dipercaya dan berlaku adil dalam menjalankan kewajibannya.⁴ Masyarakat akan melihat, merasakan dan menilai apa yang mereka telah perbuat jadi cukup dengan membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa simpatik. Karena masyarakat saat ini melihat kerja nyata dari pemimpinnya karena rata-

³ Robby Arya Brata, *Good Governance*, h. 18

⁴ Robby Arya Brata, *Good Governance*, h. 17

rata orang saat ini sudah cerdas untuk menentukan orang-orang yang memang layak menjadi pemimpin.

Sepatutnya pemimpin punya gebrakan-gebrakan agar punya kepercayaan masyarakat misalkan seseorang sudah terpilih menjadi kepala desa seyogyanya mengemban tugas tersebut dengan semaksimal mungkin misalnya desa dapat mendirikan badan usaha milik desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di samping itu, desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerja sama desa. Dalam pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga harus mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum.⁵ Hal-hal tersebut yang telah disebutkan bisa mendorong adanya partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat karena masyarakat melihat kerja nyata dari pemimpinnya.

Partisipasi politik sangatlah penting, oleh karena itu masyarakat harus turut andil dalam kegiatan demokratis tersebut. Pembangunan

⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 21-22

politik di Indonesia diarahkan pada kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan, pembaruan kehidupan politik untuk meningkatkan fungsi infrastruktur dan suprastruktur politik, interaksi secara terbuka antar dan antara keduanya sesuai dengan paham demokrasi pancasila, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran politik rakyat, meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam kehidupan politik, mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan budaya politik melalui upaya pemahaman dan pengamalan moral, etika dan sikap politik berdasarkan nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁶

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang saya temui di Desa Sukarame adalah masyarakat yang memilih pemimpin hanya berdasarkan kepopuleran calon kepala desa saja tanpa visi misi yang jelas selain itu adanya bagi-bagi uang sebelum diadakannya pemilihan, bahkan hal itu dilakukan oleh oleh kedua calon kepala desa. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui faktor atau latar belakang yang mempengaruhi mereka

⁶ Sri Soemantri , *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2015), Cet.2, h. 139

dalam menentukan pilihan dan bagaimana sikap politik masyarakat pada pelanggaran sebelum pemilihan. Dengan fokus penelitian terhadap hal tersebut penulis berharap bisa mengetahui hal-hal yang mendasari partisipasi politik mereka dalam pemilihan kepala Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa?
2. Apa keunggulan dan kekurangan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa ?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Sukarame
2. Untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Sukarame

E. Manfaat Penulisan

1. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis pribadi dalam rangka mengetahui sejauh mana masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan karakteristik masyarakat dalam menentukan figur pilihan mereka, dan mengetahui persepsi politik dari orang yang berbeda di desa yang sama, selain itu penulis bisa mengetahui pendekatan-pendekatan seperti apa yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.
2. Penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dengan penelitian yang saya teliti, sehingga bisa menambah referensi materi rujukan yang mereka butuhkan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dwi Nopiyanti (2015) Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan tahun 2013. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa diantaranya keluarga, yang

mana keluarga tersebut turut serta dalam mensosialisasikan secara tidak langsung untuk memilih kepala desa, sehingga keluarga sangatlah berpengaruh terhadap keikutsertaan mereka dalam partisipasi politik. Selain itu faktor yang mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam partisipasi politik adalah pekerjaan, dimana di desa yang diteliti kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan sangat sibuk sehingga tidak terlalu menaruh perhatian pada kegiatan politik. Selain itu dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Malang Rapat rata-rata berpendidikan rendah, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam politik.

Maya Yuliantina (2016) Pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, nilai rata-rata yang dihasilkan untuk kesadaran politik adalah 2,57 yang termasuk dalam kategori rendah. Dengan presentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran politik maka dapat dikategorikan bahwa kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena rendah. Sementara, dalam partisipasi

politiknya 31,3% menjawab sangat tidak berpartisipasi dan nilai rata-rata yang dihasilkan untuk partisipasi politik adalah 2,53 yang termasuk kategori rendah.

Rosnia Gosamgo (2013) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halimahera Utara Tahun 2010. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di Desa Mamuya ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup mereka menyangkut kepercayaan politik dimana mereka tidak memilih pada Pilkades karena yakin pemerintahan desa akan tetap berlangsung dengan tidak baik. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Mamuya dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai penggemban tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan Pilkades yang dapat melahirkan pemimpin yang sah dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yaitu dengan mengganti teknik pelaksanaan pemilihan suara, dengan memperbanyak loket pendaftaran, sehingga pemilih bisa langsung masuk ke lokasi pemberian suara setelah mendaftar tanpa perlu menunggu panggilan seperti Pilkades sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik menurut Keith Fauls memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif (the active angagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah”⁷ Herbert Mcclosky dalam international ensiclopaedia of the social scieces, Herbert Mcclosky memberikan batasan partisipasi politik sebagai” kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.”⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat diantaranya stratifikasi sosial yang sering dihubungkan dalam pembahasan tentang pengaruhnya terhadap kehidupan manusia termasuk kehidupan politik mereka yaitu status sosial ekonomi, yang dikenal dengan singkatan SSE. Dalam status sosial ekonomi terdapat

⁷ Keith Fauls, *Political Sociology: A Critical Introduction*: New York: NYU Press, 1999), h.133

⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 178-180

beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan pendapatan atau kekayaan. Asumsi teoritis tentang hubungan atau pengaruh yang dibangun oleh para ahli adalah sebagai berikut : “partisipasi politik cenderung lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi, memiliki pekerjaan lebih bagus, mempunyai pendapatan lebih tinggi, dan memiliki kekayaan lebih banyak dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah, memiliki pekerjaan kurang bagus, mempunyai pendapatan rendah dan memiliki kekayaan yang sedikit.”⁹

Di negara Indonesia yang demokratis partisipasi politik masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil dari pemilihan umum, karena secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Definisi umum ini setidaknya sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Jhon Schumpeter dalam buku klasiknya, *capitalism, socialism and democracy* yang

⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik.....*, h. 200

mengatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama (the will of the people and the common good)¹⁰

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu ciri negara yang demokratis, dimana hal tersebut pernah dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1968) menyatakan bahwa secara minimalis demokrasi dapat didefinisikan sebagai : 1) pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil 2) adanya pembagian kekuasaan yang jelas 3) terjaganya stabilitas 4) adanya tingkat partisipi yang luas dan otonom.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.

¹⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo , *Negara, Demokrasi dan Civil Society* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.33

¹¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo , *Negara.....*, h.36

1. Subjek dan objek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi politik masyarakat di Desa Sukarame dalam pemilihan kepala desa.
2. Teknik pengumpulan data, dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan melakukan wawancara di lapangan terhadap perangkat desa serta masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda baik dalam hal pendidikan, ekonomi maupun gender.
3. Teknik analisa data, adapun teknik analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif kuantitatif, teknik ini menganalisa atas masalah yang ada dalam angka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk penjelasan.

I. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM

Berisi berbagai hal-hal yang dibahas oleh penyusun baik profil desa maupun hal-hal yang sudah diteliti di lapangan.

Bab III: TINJAUAN PUSTAKA

Berupa studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis sebagai pendukung teori dan landasan pemikiran dari pembahasan yang dibahas oleh penulis.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun guna memperoleh data yang valid dan konkret tentang partisipasi masyarakat di Desa Sukarame.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya.